

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(*CSR*) DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PRAKTIK
PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI
BEI PADA TAHUN 2010-2015**



Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :
NURUL HIDAYAH
B 200 134002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*
DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN
PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2010-2015**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

NURUL HIDAYAH

B 200 134 002

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D., CA.)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2010-2015

Yang ditulis oleh:
NURUL HIDAYAH
B200134002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 21 Januari 2017
Dan dinyatakan telah emenuhi syarat
Dewan Penguji:

1. Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D, CA.
(Penguji 1)
2. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si
(Penguji 2)
3. Eny Kusumawati, SE, MM,Akt
(Penguji 3)

(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, SE, M.Si)
NIK. 642/0627016801

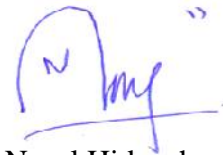
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah ditulis oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakara, 21 Januari 2017

Penulis



Nurul Hidayah

B200134002

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (*TAX
AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI
YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2010-2015**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan *corporate governance* (diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit) terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2015. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2015 sebanyak 57 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dari elemen-elemen *corporate social responsibility*, *corporate governance* dan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengungkapan *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian, misalnya dengan menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, tidak hanya sektor barang konsumsi saja agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisasikan.

Kata Kunci: *corporate governance, corporate social responsibility, tax avoidance*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of corporate social responsibility disclosure and corporate governance (which proxied by managerial ownership, institutional ownership, proportion of independent board, and audit committee) against tax avoidance in manufacture companies sector consumer goods listed in BEI for period of 2010-2015. The sample of this study is 57 manufacture companies sector consumer goods listed in BEI for period of 2010-2015. This study use multiple linear regression analysis from the elements of corporate social responsibility, corporate governance, and tax avoidance. The results of the study show that audit committee have significant effect toward tax avoidance with effective tax rate as proxy of tax avoidance. Meanwhile, tax avoidance was not affected significantly by corporate social responsibility disclosure, managerial ownership, institutional ownership and the proportion of the independent board. For the next research, researcher suggested to expand the object of the study, such as use all manufacture companies listed in BEI, not only consumer goods sector, so that the result can be generalized.

Keyword: *corporate governance, corporate social responsibility, tax avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Ning, 2013;1). Bagi para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Santoso dan Ning, 2013;2). Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, antara lain *corporate social responsibility* dan *corporate governance*.

Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012). Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap

sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Tata kelola perusahaan adalah isu yang mendapat perhatian secara istimewa di Indonesia setelah kejadian krisis moneter tahun padamasa pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam rangka memperbaiki tata kelola perusahaan, sejak tahun 1999 Komite Nasional Kebijakan Governance telah dibentuk dimana mereka telah mengeluarkan panduan tata kelola perusahaan yang baik, dimana panduan ini mengalami perbaikan pada tahun selanjutnya.

Menurut Fadhilah (2014) mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* (CG) ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit.

Hasil penelitian Pramuditao dan Sari (2015) menyimpulkan bahwa adanya kepemilikan manajerial dapat memberikan pengawasan terhadap perusahaan. Peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Penghindaran pajak hanya mengejar keuntungan jangka pendek dimana hal ini dapat merugikan perusahaan, karena tidak memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut, seperti masalah hukum dan reputasi perusahaan. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini akan diuji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak,

mengingat angka investor institusional yang cukup besar di perusahaan yang terdaftar di BEI. Perlu diketahui apakah mereka cukup efektif dalam mengawasi kinerja manajer perusahaan terutama dalam kebijakan perpajakan yang diambil.

Selain dari struktur kepemilikan, tindakan manajemen juga diawasi melalui dewan komisaris independen. Adanya dewan komisaris independen menyebabkan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dapat terjaga karena komisaris independen lebih objektif dan independen terhadap keputusan yang ditetapkan manajemen perusahaan. (Laila, 2011)

Komite audit dibentuk agar meringankan tugas dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan secara internal dan pembuatan laporan keuangan. Komite audit memiliki peran penting dalam menyediakan komunikasi formal antara pihak internal serta eksternal perusahaan. Sehingga dengan adanya keberadaan komite audit akurasi terhadap laporan keuangan dapat ditingkatkan serta kepercayaan pihak yang berkepentingan dapat terjaga. Komite audit harus memiliki paling sedikit satu orang yang memiliki latar belakang bidang keuangan. Hal ini penting karena melalui kemampuan ini efektifitas komite audit dapat ditingkatkan. Komite audit diketuai oleh dewan komisaris independen perusahaan.

Penelitian terkait penghindaran pajak, *corporate social responsibility* dan *corporate governance* telah dilakukan sebelumnya dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) menyimpulkan bahwa CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Salbi dan Noor (2012) menyimpulkan tidak ada pengaruh presentase direktur independen dan investor institusional terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Winata (2013) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit sebagai proksi *corporate governance* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen serta ukuran komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana *tax avoidance* diukur menggunakan *book tax gap*. Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan investor institusional, KAP, serta independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan, sedangkan jumlah dewan komisaris dan komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menjadi suatu hal yang biasa dan legal dilakukan oleh perusahaan, namun hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah mengharapkan perusahaan membayar pajaknya tanpa menggunakan mekanisme penghindaran pajak. Upaya perusahaan untuk mengoptimalkan laba perusahaan masih menjadi alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang dinilai kurang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak suatu perusahaan

2. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2015. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Perusahaan barang konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut untuk periode 31 Desember 2010 - 31 Desember 2015, (2) Perusahaan barang konsumsi yang memiliki data keuangan dan data pasar yang lengkap, (3) Perusahaan barang konsumsi yang mengungkapkan CSR di dalam *annual report*nya

2.2 Definisi dan Operasional Variabel

2.2.1 Variabel Independen

a) *Corporate Social Responsibility*

Dalam penelitian ini variabel independen yaitu CSR akan diukur dengan menggunakan *Corporate Social Disclosure Index (CSDI)* yang berdasarkan GRI-4. Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan sebanyak 149 item. Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila item *i* diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item *i* tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada *check list*. Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum x_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRI_j : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j

X_{ij} : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan.

N_j : jumlah item untuk perusahaan j, n_j = 149.

b) Kepemilikan Manajerial (KM)

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Boediono dalam Eny, 2015). Variabel kepemilikan manajerial diukur menggunakan *dummy*, indikator untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah ada atau tidaknya kepemilikan manajerial atas perusahaan. Kekayaan pribadi manajemen yang semakin terkait dengan nilai perusahaan diharapkan akan membuat manajemen untuk bertindak demi meningkatkan nilai perusahaan dengan sendirinya. Jika pada perusahaan sampel terdapat kepemilikan manajerial maka dinilai 1, dan jika tidak terdapat kepemilikan manajerial maka dinilai 0.

c) Kepemilikan Institusional (KI)

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner dalam Eny, 2015). Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

d) Proporsi Dewan Komisaris Independen (DK)

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KKNK, 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel.

e) Komite Audit (KA)

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit diukur dengan menggunakan indikator banyaknya jumlah anggota komite audit dalam setiap perusahaan di setiap tahunnya.

2.2.2 Variabel Dependen

1) Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai variabel dependen. ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan (Yoehana, 2013). Tarif pajak efektif (*effective tax rates – ETR*) sering dipakai oleh para pembuat keputusan dan kelompok-kelompok yang berkepentingan sebagai alat untuk menilai kelayakan suatu sistem pajak yang terkait dengan perusahaan (badan). Penggunaan ETRs sebagai alat penilaian dianggap sangat berguna karena melalui ETRs maka pihak yang berkepentingan dapat melihat efek dari berbagai insentif pajak dan tarif pajak perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997; Richardson dan Lanis, 2007 dalam Sari, 2014). Semakin besar nilai ETR menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Perhitungan ETR menggunakan model dari Lanis dan Richardson (2012).

$$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{pendapatan sebelum pajak}}$$

2.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression Method*). Analisis ini untuk menguji apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Metodel persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 CSR + \beta_2 KM + \beta_3 KI + \beta_4 DK + \beta_5 KA$$

Keterangan:

ETR : Effective Tax Rate

β_0 : Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien Regresi

CSR : *Corporate Social Responsibility*

KM : Kepemilikan Manajerial

KI : Kepemilikan Institusional

DK : Proporsi Dewan Komisaris Independen

KA : Komite Audit

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terhadap data yang digunakan untuk analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan oleh peneliti terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

a) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *asympt.sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,483. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semua data terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Dengan melihat besarnya *Tolerance Value* lebih dari 0,01 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah nilai 10 pada uji multikolinearitas, maka dapat disimpulkan masing-masing variabel independen tidak mengandung gejala multikolinieritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam menguji heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji glejser. Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan semua variabel independen bebas heteroskedastisitas.

3.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

a) Pengujian *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t, membuktikan bahwa pengungkapan CSR memiliki signifikansi lebih besar dari *level of significant* yaitu sebesar $0,208 > 0,05$ dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-1,274 < 1,67203$ sehingga diperoleh hasil H1 ditolak. Hal ini menunjukkan pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dapat diartikan bahwa apabila nilai pengungkapan CSR besar, maka belum tentu praktik penghindaran pajak perusahaan rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011) dan Pradipta dan Supriyadi (2015), yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi level pengungkapan CSR

yang dilakukan oleh perusahaan, maka rendah tingkat praktik penghindaran pajak perusahaan. Perbedaan ini dapat dikarenakan item-item pengungkapan CSR pada GRI 4 yang masih belum spesifik sehingga mengakibatkan perbedaan interpretasi item pengungkapan antara penulis satu dengan yang lain. Selain itu volatilitas pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI berbeda dengan populasi yang menggunakan sektor yang berbeda.

b) Pengujian Kepemilikan Manajerial terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t, membuktikan bahwa kepemilikan manajerial memiliki signifikansi lebih besar dari *level of significant* yaitu sebesar $0,953 > 0,05$ dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-0,059 < 1,67203$ sehingga diperoleh hasil H2 ditolak. Hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dapat diartikan bahwa dengan adanya kepemilikan manajerial bukan berarti praktik penghindaran pajak akan berkurang. Jumlah perusahaan sampel yang ada kepemilikan manajerialnya sedikit (20 perusahaan) sehingga tidak mampu menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik penghindaran pajak. Pada perusahaan yang ada kepemilikan manajerial, presentase manajer yang memiliki saham relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan modal yang dimiliki investor umum dan institusi, menyebabkan terjadinya kegagalan pihak manajemen yang juga merupakan pemilik modal perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan proses pelaporan keuangan dan mencegah praktik penghindaran pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

c) Pengujian Kepemilikan Institusional terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t, membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki signifikansi lebih besar dari *level of significant* yaitu sebesar $0,443 > 0,05$ dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0,774 < 1,67203$ sehingga diperoleh hasil H3 ditolak. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dapat diartikan bahwa dengan kepemilikan institusional bukan berarti praktik penghindaran pajak akan berkurang. Hasil sesuai dengan penelitian Annisa (2011), Annisa dan Kurniasih (2012),

Sari (2014), dan Diantari dan Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa struktur saham yang dimiliki oleh pihak institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Schleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Seharusnya hal ini dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, tapi pemilik institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap opportunistiknya dalam melakukan manajemen laba yang berakibat pada *tax avoidance*. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris, sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung *stakeholder theory* yang mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan bagi semua stakeholder lainnya (kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007).

d) Pengujian Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t , membuktikan bahwa proporsidewan komisarisindependen memiliki signifikansi lebih besar dari *level of significant* yaitu sebesar $0,399 > 0,05$ dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0,851 < 1,67203$, sehingga diperoleh hasil H4 tidak terdukung. Hal ini berarti bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dapat diartikan juga bahwa semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan belum berhasil mengurangi praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan komisari independen belum efektif dalam menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi praktik penghindaran pajak di perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Annisa (2011), Annisa dan Kurniasih (2012), dan Pramudita dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak secara signifikan.

Sebagian besar penunjukan atau pengangkatan dewan komisaris independen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dipilih oleh pemegang saham mayoritas, sehingga apabila tidak sejalan dengan keputusan pemilik maka perusahaan dapat melakukan pergantian. Jadi, meskipun presentase dewan komisaris independen relatif besar, tetapi mereka tidak benar-benar dapat bertindak secara independen dalam menjalankan fungsi pengawasan karena terbatas oleh peraturan dan kebijakan dari pemegang saham mayoritas, sehingga sulit untuk mewujudkan pelaksanaan *good corporate governance* secara optimal untuk membatasi praktik penghindaran pajak. (Agustia, 2013)

e) Pengujian Komite Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t, membuktikan bahwa komite audit memiliki signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu sebesar $0,007 < 0,05$ dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,79 > 1,67203$ sehingga diperoleh hasil H5 diterima. Hasil ini berarti bahwa jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang, kurang dari tiga maka tidak sesuai dengan peraturan BEI, jadi jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Fadhillah (2014) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003 dalam Annisa, 2011). Fungsi pengawasan ini apabila dijalankan sebagaimana mestinya dapat mencegah manajemen melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi jumlah komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance*, sehingga akan memperkecil kemungkinan aktivitas *tax avoidance*.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pengungkapan *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan baik dalam pengambilan sampel maupun dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: (1) Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015 sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat ditarik kesimpulannya untuk sektor-sektor yang lain. (2) Pengukuran variabel komite audit dan dewan komisaris dalam penelitian ini hanya menggunakan kuantitas keanggotaan (dilihat dari jumlah dan proporsi).

4.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian, misalnya dengan menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, tidak hanya sektor barang konsumsi saja. Atau dengan menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI semua sektor agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. (2) Peneliti selanjutnya dalam mendeteksi *corporate governance* dapat mengkombinasikan pendekatan struktur maupun pendekatan penilaian *good corporate governance* berdasarkan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

Agustia, Dian. 2013. Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* ISSN 2338-8137 Vol. 15 No. 1 Mei 2013, 27-42.

- Annisa, Nuralifnida Ayu dan Kurniasih, Lulus. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8, No. 2, Mei 2012, hal 95-189.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2 (1).
- Haruman, Tendi. 2008. Struktur Kepemilikan, Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Finance and Banking Journal*. Volume 10, No. 2 Hal: 150-165. Bandung
- Kusumawati, Eny. 2015. Pengaruh Asimetri Informasi dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Praktik Earning Management. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Laila, N. 2011. Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. Sripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggresiveness: an Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*. 31, 86-108.
- Pradipta, Dyah Ayu dan Supriyadi. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *SNA XVIII, Universitas Sumatera Utara, Medan*. 16-19 September 2015.
- Pramudito, Batara Wiryo dan Sari, Maria M. Ratna. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.13.3 Desember (2015): 705-72.2
- Salbi, Nurshimini dan Noor Md Rohaya. 2012. Tax Planning and Corporate Governance. *Proceeding Internasional Conference on Business and Economic Bandung*.
- Santoso, Iman dan Ning, Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax).
- Sari, G.M. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Watson, Luke. 2011. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefit. *Article in SSRN Electric Journal*. November 2011.
- Yoehana, Marreta. 2013. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*.